

ABSTRAK

Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Terhadap Transparansi Pengelolaan Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Oleh

Jon Novri

Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk memiliki kualitas dan profesionalisme, sehingga PNS dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, sehingga diharapkan penyelenggaraan *good governance* dapat terlaksana seperti yang dicita-citakan bersama. Elemen dari *good governance* terdapat berbagai aspek salah satunya adalah transparansi. Adanya transparansi dalam *good governance* menjadi tolok ukur keberhasilan dari terselenggaranya pemerintahan yang baik dalam tubuh birokrasi. Transparansi merupakan cerminan dari baik buruknya pelaksanaan pelayanan publik, sumber informasi yang bersifat transparan mendorong perbaikan pelayanan yang di berikan pemerintah, anggaran serta estimasi biaya yang bersifat transparan mendukung tercapainya pelayanan yang maksimal yang di terima oleh masyarakat itu sendiri maupun birokrasi itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaruh antara kinerja pelayanan BKD terhadap transparansi pengelolaan pensiun Pegawai Negeri Sipil dan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara kinerja pelayanan BKD terhadap transparansi pengelolaan pensiun Pegawai Negeri Sipil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi kinerja pelayanan publik dengan transparansi pengelolaan pensiun sebesar 0,446 dengan kriteria hubungan positif yang sedang. Besarnya nilai koefisien determinasi ($R [r^2]$) yang diperoleh adalah 0,446. Hal ini berarti peranan variabel kinerja pelayanan publik terhadap transparansi pengelolaan pensiun adalah sebesar 44,6 %. Perolehan ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik memiliki peranan atau sumbangan pengaruh terhadap transparansi pengelolaan pensiun pada BKD Provinsi Lampung sebesar 44,6 % dan sisanya 55,4 % dipengaruhi oleh variabel lain. Berdasarkan uji regresi sederhana maka dapat disimpulkan bahwa nilai konstanta (a) adalah 12,770 dan koefisien regresi (b) adalah 0,131 yang menyatakan bahwa jika tidak ada kinerja pelayanan publik, maka nilai transparansi pengelolaan pensiun adalah 0,131. Koefisien arah regresi adalah 0,131 menyatakan bahwa setiap peningkatan kinerja pelayanan publik akan meningkatkan transparansi pengelolaan pensiun sebesar 0,131. Dari ketentuan ini diketahui bahwa jika kinerja pelayanan publik ditingkatkan hingga maksimum (150, yakni 5×30 , 5 skor tertinggi dan 30 jumlah butir instrumen kinerja pelayanan publik) maka persamaan regresinya menjadi $Y = 12,770 + 0,131 (150)$ dan hasil yang didapatkan adalah 32,42, sehingga apabila semakin tinggi nilai (x), maka

makin tinggi juga nilai (y) atau nilai variabel (x) diikuti pula kenaikan nilai variabel (y). Kemudian dilanjutkan dengan menentukan keputusan uji hipotesis dengan menggunakan uji statistik regresi parsial (uji t). Berdasarkan perhitungan SPSS dari tabel *coefficients* diperoleh t hitung sebesar 3,829 yang artinya dengan taraf signifikan 5% (0,05) dan derajat kebebasan (dk) 59 (n-2). Hasil t hitung dikonsultasikan dengan nilai t tabel yang sebelumnya diinterpolasi, karena nilai t tabel untuk jumlah sampel 59 tidak tersedia. Nilai yang dihasilkan dari interpolasi t tabel untuk uji dua pihak sebesar 2,011 pada tingkat kepercayaan 0,05. Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa t hitung lebih besar dari t tabel dengan persamaan sebagai berikut : t hitung (3,829) > t tabel (2,011), maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, melalui koefisien regresi tersebut diketahui hubungan dari kedua variabel yang diuji adalah signifikan dan dapat diberlakukan pada tempat dimana sampel diambil. Dengan demikian terdapat pengaruh kinerja pelayanan publik terhadap transparansi pengelolaan pensiun di BKD Provinsi Lampung.

Kata kunci : Kinerja, Pelayanan, Transparansi